



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0801 /KUM/2022

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah, dipandang perlu untuk menyusun program pembentukan peraturan daerah sebagai dasar penyusunan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.
- KEDUA :** Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 188.44/ 0801 /KUM/2022
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN 2023

A. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

| NO | JENIS | JUDUL PERDA | MATERI POKOK | STATUS | | PELAK-SANAAN | DISERTAI | | SKPD PENGUSUL | TARGET PENYELESAIAN | KTR |
|-----|------------------|--|--------------|--------|------|---|----------|---------------------------|---|---------------------|------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan/ keterangan | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Peraturan Daerah | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | V | | Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi | V | | Badan Keuangan Daerah | 2023 | |
| 2. | Peraturan Daerah | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. | | | V | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | V | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | |

| NO | JENIS | JUDUL PERDA | MATERI POKOK | STATUS | | PELAK-SANAAN | DISERTAI | | SKPD PENGUSUL | TARGET PENYELESAIAN | KTR |
|-----|------------------|---|--------------|--------|------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan/ keterangan | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3. | Peraturan Daerah | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | | | V | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | V | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 2023 | |
| 4. | Peraturan Daerah | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038. | | | V | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | V | Dinas Perindustrian | 2023 | |
| 5. | Peraturan Daerah | Analisis Dampak Lalu Lintas. | | V | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | V | | Dinas Perhubungan | 2023 | |
| 6. | Peraturan Daerah | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam | | | V | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | V | Dinas Kehutanan | 2023 | |

B. DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

| NO | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAK-SANAAN | DISERTAI | | SKPD PENGUSUL | TARGET PENYELESAIAN | KTR |
|-----|------------------|---|---|--------|------|---|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan/ keterangan | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Peraturan Daerah | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 | V | | Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi | | | Badan Keuangan Daerah | Tahun 2023 | |
| 2. | Peraturan Daerah | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 | V | | Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi | | | Badan Keuangan Daerah | Tahun 2023 | |
| 3. | Peraturan Daerah | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 | V | | Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi | | | Badan Keuangan Daerah | Tahun 2023 | |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR